

## DAFTAR PUSTAKA

### I. Buku

- Ali, H. Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bachrudin, H., 2019, *Hukum Kenotariatan : Teknik Pembuatan Akta dan Bahasa Akta*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Bachrudin, H., H. Gunarto dan H. Eko Soponyono, 2019, *Hukum Kenotariatan : Membangun Sistem Kenotariatan Indonesia Berkeadilan*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Badruzaman, Mariam Darius, 1991, *Perjanjian Kredit Bank*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok.
- Harsono, Boedi, 2013, *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- HS, H. Salim, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Indrajaya, Rudi, dkk, 2020, *Notaris dan PPAT suatu pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Parlindungan, A.P., 2009, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Salfutra, Reko Dwi, 2019, *Hukum Agraria Indonesia*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Santoso, Urip, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2018, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sutedi, Adrian, 2017, *Hukum Hak Tanggungan*, Sinar Grafika, Jakarta.

## **II. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan yang memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Pertanahan secara Elektronik.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi secara Elektronik.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Terbatas.

Kode Etik Notaris.

Kode Etik Pejabat Pembuat Akta Tanah.

### III. Jurnal

Anugrah, Nadia Fauziah dan Suwari Akhmaddhian, Desember 2020, *Sanksi Kode Etik bagi Notaris yang tidak Menjalankan Kewajiban Jabatannya*, Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Volume 11 Nomor 2, Universitas Kuningan.

Assikin, Yovita Christian, Lastuti Abubakar dan Nanda Anisa Lubis, Desember 2019, *Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah berkaitan dengan dibatalkan Akta Jual Beli ditinjau dari peraturan perundangan yang berlaku*, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Volume 3 Nomor 1, Universitas Padjadjaran.

Gunarta, I Made Dwi, Akur Nurasa dan Sukmo Pinuji, September 2020, *Persepsi Kreditur dan PPAT terhadap kualitas layanan Hak Tanggungan terintegrasi secara elektronik*, Jurnal Tunas Agraria Volume 3 Nomor 3, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Maryam, Neneng Siti, Juni 2016, *Mewujudkan Good Governance melalui pelayanan publik*, Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Volume 6 Nomor 1, Politeknik Kridatama Bandung.

Memah, Genesis Hardina, April 2020, *Jabatan Notaris Dalam Era Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Jurnal Hukum Kenotariatan Volume 5 Nomor 1, Universitas Udayana.

Mirfa, Enny, Juni 2016, *Perbandingan Hukum Jabatan Notaris di Indonesia dan di Negara Belanda*, Jurnal Ilmiah Research Sains Volume 2 Nomor 2, Universitas Samudera Langsa.

Rahmi, Elita, November 2016, *Wajah Baru PPAT Dalam Proses Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Jurnal Notariil Volume 1 Nomor 1, Universitas Jambi.

Saputra, Denny dan Sri Endah Wahyuningsih, September 2017, *Prinsip Kehati-hatian bagi Notaris/PPAT dalam menjalankan tupoksinya dalam upaya pencegahan kriminalisasi berdasarkan Kode Etik*, Jurnal Akta Volume 4 Nomor 3, Universitas Islam Sultan Agung.

Tuwaidan, Rossel Ezra Johannes, Agustus 2018, *Kewenangan Notaris menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014*, Jurnal Hukum Unsrat Volume 6 Nomor 6, Universitas Sam Ratulangi.

Wirawan, Vani, Maret 2020, *Penerapan E-Government dalam menyongsong Era Revolusi Industri 4.0 Kontemporer di Indonesia*, Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan Volume 1 Nomor 1, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

#### **IV. Website**

<https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/kanwil-kemenkumham-sumut-melaksanakan-dialog-interaktif-radio-terkait-penerapan-prinsip-mengenal-pengguna-jasa-pmpj-bagi-notaris> diakses pada tanggal 1 September 2021 Pukul 14 : 00 WIB.

Panduan Layanan Informasi Pertanahan Elektronik, Pengecekan Sertifikat, [htel.atrbpn.go.id](http://htel.atrbpn.go.id) diakses pada tanggal 27 September 2021 Pukul 14:00 WIB.

Panduan Hak Tanggungan Elektronik, <https://docs.atrbpn.go.id/htel/ppat/apht/> diakses pada tanggal 28 September 2021 Pukul 15:00 WIB.

#### **V. Sumber-Sumber Lain**

Muzhar, Cahyo R, Powerpoint Slides, *Perseroan Perorangan*, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Siregar, Santun M, Powerpoint Slides, *Peran Ditjen Ahu dalam memberikan kepastian hukum bagi UMKM*, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Wawancara dengan Notaris/PPAT Mimin Rusli, S.H. pada tanggal 16 September 2021.